

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Achmad Ali. 2002. *Keterpurukan Hukum di Indonesia: Penyebab dan Solusi*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Achmad Ali. 2013. *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*. KENCANA. Jakarta.
- Aminuddin Ilmar. 2018. *Hukum Tata Pemerintahan*. Cetakan ketiga. KENCANA. Jakarta.
- Andriansyah, dkk. 2021. *Academic Constitutional Drafting: Rancangan Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Terkait Dengan Pokok-Pokok Haluan Negara*. Cetakan Pertama. Badan Pengkajian MPR RI. Jakarta.
- Bagir Manan dan Susi Dwi Harijanti. 2014. *Memahami Konstitusi: Makna dan Aktualisasi*. Cetakan Pertama. PT. Rajagrafindo Persada. Jakarta.
- Boy Nurdin. 2012. *Kedudukan dan Fungsi Hakim dalam Penegakan Hukum di Indonesia*. PT. Alumni. Bandung.
- Danang Wijayanto. 2018. *Meluruskan Arah Manajemen Kekuasaan Kehakiman*. Cetakan pertama. Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia. Jakarta.
- E. Fernando M. Manullang. 2017. *Legisme, Legalitas, dan Kepastian Hukum*. Cetakan kedua. PT. Kharisma Putra Utama. Jakarta.
- Irwansyah. 2020. *Penelitian Hukum: Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel*. Cetakan ketiga. Mira Buana Media. Yogyakarta.
- Ishaq. 2016. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Cetakan Pertama. Sinar Grafika. Jakarta.
- Jimly Asshiddiqie. 2015. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. PT. Rajagrafindo Persada. Jakarta.

- Joenadi Efendi dan Johnny Ibrahim. 2018. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Kencana. Jakarta.
- Khozim M (Penerjemah). 1975. *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*, terjemahan dari *The Legal System (A Social Science Perspective)*. Bandung. Nusa Media.
- Martin Suryajaya. 2016. *Sejarah Pemikiran Politik Klasik: Dari Prasejarah Hingga Abad ke-4 M*. Cetakan pertama. CV. Marjin Kiri Tangerang Selatan.
- Mohammad Mahrus Ali. 2019. *Tafsir Konstitusi: Menguji Konstitusionalitas dan Legalitas Norma*, Cetakan pertama. Pt. Rajagrafindo Persada. Depok.
- MPR RI. 2017. *Materi Sosialisasi Empat Pilar*. Cetakan ketujuh. Sekretariat Jenderal MPR RI. Jakarta.
- Ni'matul Huda. 2018. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Cetakan kedua belas. PT. Rajagrafindo Persada. Jakarta.
- R. Soeroso. 2014. *Penggantar Ilmu Hukum*. Cetakan keempat belas. Sinar Grafika. Jakarta.
- Ridwan HR. 2014. *Hukum Administrasi Negara*, Edisi Revisi, Cetakan kesebelas. PT. Rajagrafindo Persada. Jakarta.
- Ronny Rahman Nitibaskara. 2006. *Tegakkan Hukum Gunakan Hukum*. PT. Kompas Media Nusantara. Jakarta.
- Saldi Isra. 2020. *Lembaga Negara Konsep, Sejarah, Wewenang, dan Dinamika Konstitusional*. Cetakan Pertama. PT. Rajagrafindo Persada. Depok.
- Satjipto Rahardjo. 2012. *Ilmu Hukum*, Cetakan kedelapan. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Satya Arinanto dan Ninuk Triyanti (ed). 2011. *Memahami Hukum dari Konstruksi sampai Implementasi*. Cetakan kedua. PT. Rajagrafindo Persada. Jakarta.
- Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi. 2010. *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun*

1945: *Buku VI Kekuasaan Kehakiman*. Cetakan kedua, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.

Penelitian Skripsi

Maulana Ishaq. 2016. *Penggunaan Hakim Tunggal Pada Penyelesaian Gugatan Sederhana dalam Sistem Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*. Skripsi. Sarjana Hukum. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Jakarta. hlm. 1-72.

Via Puspasari. 2016. *Pertimbangan Hakim Tunggal dalam Perkara Dispensasi Kawin Menurut Perma No. 5 tahun 2019 (Analisis Penetapan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 0420/Pdt.P/2020/PA.Pwt)*. Skripsi. Sarjana Hukum. Universitas Islam Negeri Prof. Kh. Saifuddin Zuhri. Purwokerto. hlm. 1-85.

Artikel Jurnal

Adisti Pratama Ferevaldy dan Ghansham Anand. 2017. "Kedudukan Hakim Tunggal dalam Gugatan Sederhana (Small Claim Court)." ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata. Universitas Udayana, Vol. 3, Nomor 2 Juli-Desember, hlm. 205-226.

Atip Latipulhayat. 2017. "Due Process of Law." Padjajaran Journal of Law. Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Vol. 4, Nomor 2. hlm. ii.

Bahder Johan Nasution. 2014. "Sejarah Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia," INOVATIF Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Jambi, Vol. 7, Nomor 3 September. hlm. 13-32.

M. Muslih. 2017. *Negara Hukum Indonesia Dalam Perspektif Teori Hukum Gustav Radbruch (Tiga Nilai Dasar Hukum)*. Legalitas: Jurnal Hukum. Volume 4 Nomor 1. hlm. 130-152.

Mochammad Agus Rachmatulloh dan Moch Choirul Rizal. 2021. "Asas-Asas Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia." Catatan Perkuliahan. Volume 1 Nomor 1. hlm. 1-6.

Wahyu Nugroho. 2014. "Rule Breaking dan Integritas Penegak Hukum Progresif Dalam Pemberantasan Korupsi Pejabat Daerah." Jurnal Yudisial. Volume 7 Nomor 1. hlm. 70-87.

Sumber Koran Online

<https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/fenomena-kekurangan-hakim-dan-status-hakim-tunggal-oleh-marwan-s-ag-m-ag-21-2>. diakses pada Rabu, 15 Desember 2021.

<https://ditbinganis.badilag.net/vision/perizinan.php?izin=hakimtunggal>. diakses pada Rabu, 15 Desember 2021.

460474/kurang-hakim-di-daerah-kehamilan-hakim-jadi-kendala-sendiri. diakses pada Rabu, 30 Maret 2022.

<https://inipasti.com/perspektif-perselingkuhan-hukum-dan-kekuasaan/>. diakses pada Kamis, 14 April 2022.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Diundangkan di Jakarta pada tanggal 30 Desember 1985. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 3316.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Diundangkan di Jakarta pada tanggal 31 Desember 1981. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 3209.

Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Diundangkan di Jakarta pada tanggal 29 Oktober 2009. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5234.

Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Diundangkan di Jakarta pada tanggal 12 Agustus 2011. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82.

Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Diundangkan di Jakarta pada tanggal 17 Oktober 2014. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 292. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 55601

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHAP. Ditetapkan di Jakarta pada 27 Februari 2012.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Diundangkan di Jakarta pada tanggal 7 Agustus 2015. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1172.